

## Dikawal Langsung oleh Gubernur, Bansos 2021 Mulai Dibagikan



*radar Banjarmasin*

Senin, 4 Januari 2021 Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi melakukan Peluncuran Bantuan Tunai Se-Indonesia Tahun 2021 secara virtual di Istana Negara Jakarta.

Terdapat tiga jenis bantuan yang diluncurkan, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Selain secara simbolis diberikan kepada sejumlah penerima yang hadir di Istana Negara, juga dilaksanakan penyerahan bantuan tunai oleh para gubernur di 34 provinsi di Indonesia yang terhubung secara virtual.

Di Kalimantan Selatan, penyerahan dilaksanakan di Gedung Idham Chalid, Sekretariat Pemprov Kalsel oleh Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor kepada para perwakilan keluarga penerima manfaat (KPM).

Tahun 2021 ini, penyaluran bantuan sosial akan terus dilanjutkan. Dalam APBN 2021 pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp110 triliun untuk seluruh penerima dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote.

Diharapkan bantuan ini dapat meringankan keluarga-keluarga yang terdampak pandemi Covid-19. Serta, bisa menjadi pemicu untuk menggerakkan ekonomi nasional kita, mengungkit ekonomi nasional kita, memperkuat daya beli masyarakat sehingga kita harapkan pertumbuhan ekonomi nasional menjadi meningkat dan lebih baik.

Jokowi juga meminta para menteri dan gubernur mengawal pencairan bantuan sosial, supaya tepat sasaran. Serta agar tidak ada pemotongan. Karena bantuan dikirim langsung kepada penerima melalui bank pemerintah dan Kantor Pos.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengaku siap mengawal bansos hingga sampai ke tangan masyarakat. Dan juga menginstruksikan SKPD terkait agar ini ditangani dengan baik, serta tidak ada pemotongan.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pemprov Kalsel, Siti Nuryani menerangkan, bansos terbanyak yang disalurkan di Kalsel ialah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako. Program ini ada 141.658 keluarga yang menerimanya, sedangkan untuk Bantuan Sosial Tunai (BST) ada sebanyak 104.248 keluarga yang menerima. Sementara KPH ada sebanyak 91.103 keluarga penerima.

Kalau secara nasional, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dalam laporannya, PKH ditargetkan menysasar 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp28,7 triliun. Penyaluran dilakukan dalam empat tahap yaitu bulan Januari, April, Juli, dan Oktober melalui bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).

Sementara, sasaran BPNT/Kartu Sembako target pertama adalah 18,8 juta keluarga, masing-masing mendapatkan Rp200 ribu setiap bulannya. dengan target anggaran sebesar Rp42,5 triliun. Penyaluran juga dilakukan oleh bank Himbara.

Adapun BST menysasar 10 juta keluarga, masing-masing mendapatkan Rp300 ribu selama empat bulan dari bulan Januari sampai April. Bantuan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Total anggaran untuk program ini adalah Rp12 triliun.

Sedangkan untuk Bantuan Sosial Tunai (BST), dia menyebut, ada sebanyak 104.248 keluarga yang menerima. Sementara KPH ada sebanyak 91.103 keluarga penerima.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://kalsel.prokal.co>, *Dikawal Langsung Oleh Gubernur Bansos 2021 Mulai Dibagikan*, Selasa 5 Januari 2021
2. <https://kalsel.antaranews.com>, *Paman Birin: Pemprov Kalsel Siap Kawal Bansos 2021*, Selasa 5 Januari 2021

## Catatan Berita:

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

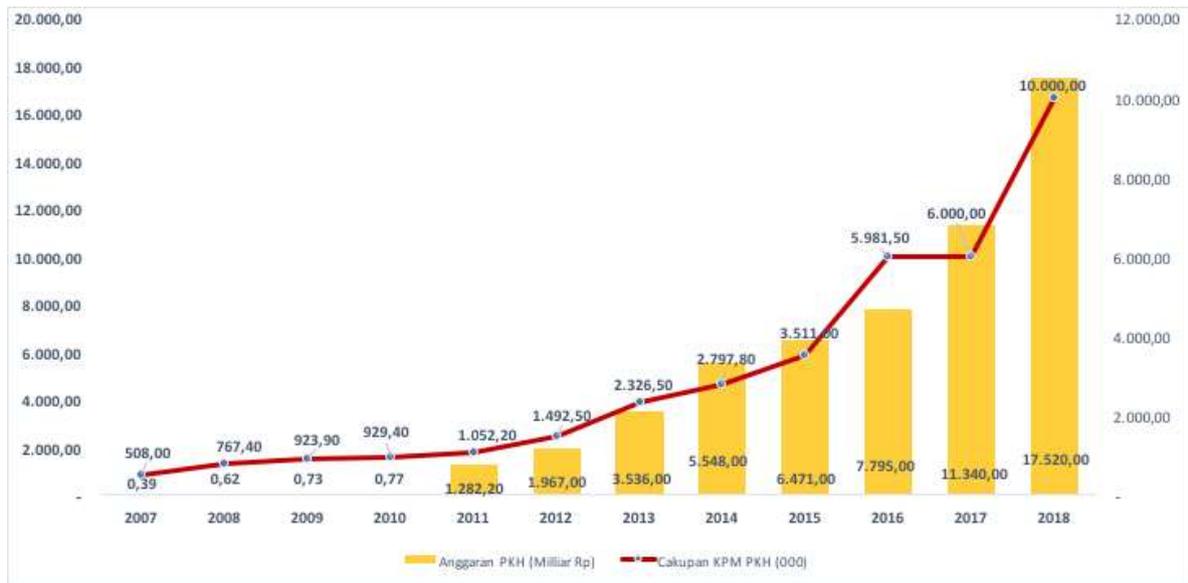
Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Melalui PKH, KM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan *center of excellence* penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Misi besar PKH untuk menurunkan kemiskinan semakin mengemuka mengingat jumlah penduduk miskin Indonesia sampai pada Maret tahun 2016 masih sebesar 10,86% dari total penduduk atau 28,01 juta jiwa (BPS, 2016). Pemerintah telah menetapkan target penurunan kemiskinan menjadi 7-8% pada tahun 2019, sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2015-2019. PKH diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, menurunkan kesenjangan (*gini ratio*) seraya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa PKH memberikan dampak terhadap perubahan konsumsi rumah tangga, seperti di beberapa negara pelaksana CCT lainnya. PKH berhasil meningkatkan konsumsi rumah tangga penerima manfaat di Indonesia sebesar 4,8%.



Gambar 1. Cakupan PKH Tahun 2007 s.d. 2018

- Pada PJP Tahun 2010 - 2014 terjadi peningkatan target *beneficiaries* dan alokasi budget PKH, melampaui *baseline* target perencanaan
- Pelaksanaan PKH tahun 2016 sebanyak 6 juta keluarga miskin dengan anggaran sebesar Rp. 10 Triliun
- Jumlah penerima PKH tahun 2017 sebanyak 6.228.810 keluarga dengan anggaran sebesar Rp. 11,5 Triliun
- Jumlah penerima PKH tahun 2018 sebanyak 10.000.232 KPM dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17,5 Triliun
- Target penerima PKH tahun 2019 sebanyak 10 juta KPM dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 32,65 Triliun

KPM PKH harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban KPM PKH di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah. Sedangkan kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. Dan untuk komponen kesejahteraan sosial yaitu penyandang disabilitas dan lanjut usia mulai 60 tahun.

Di kuartal III tahun 2020, Kementerian Sosial kembali meluncurkan program bantuan sosial berupa beras dengan tujuan untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat.

Menteri Sosial Juliari P. Batubara menanggapi arahan Presiden, agar kementerian mendorong program yang memiliki daya ungkit perekonomian. Salah satunya adalah Bansos Beras yang bisa membantu mengurangi sebagian beban ekonomi masyarakat.

Lebih lanjut Mensos menyatakan bahwa Bansos Beras akan disalurkan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yang akan diberikan selama 3 bulan berturut-turut. Total sasaran dalam program ini sebanyak 10 juta KPM.

Program bansos beras ini merupakan salah satu program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dalam penanganan COVID-19, selain dari program reguler PKH, Sembako, dan BPNT yang sudah terlaksana sebelumnya.

Data yang akan digunakan sebagai dasar penerima bansos beras adalah data *by name by address* (BNBA) perluasan. Data ini merupakan KPM PKH yang menerima bantuan bulan Agustus 2020. Transporter adalah pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Sosial untuk membantu pengantaran beras dari Perum Bulog sampai ke KPM PKH.